

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Politea, Bogor.

Adami Chazwi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, 2013, Rajawali Press, Jakarta.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, 2020, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Hilman Ali Ferdinand, (2015), *Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2

Fadhlurrahman dan Mohd Din, (2018), *KUALIFIKASI AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1. ISSN : 2597-6893.

Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.

DOI:<https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>

Afifah, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Al Ahkam*, 16(2), 27-43. DOI:

<https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3614>

Achmad Syamsul Iskandar, (2021), *Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia*, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1. DOI:

<https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4624>

I Kade Dwi Suryawandika. (2021). Kedudukan Ahli Dalam Gelar Perkara Khusus Tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Lambung Makurat Law Journal*. ISSN: 2715-4688

Medeline, F., Rusmiati, E., & Ramadhani, R. H. (2022). Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 310-325. DOI:

<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>

Budoyo, S., Widodo, W., & Lailatus'adah, N. (2023). Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 325-338. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>

Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-undang No.

39 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Internet

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6847663/suami-di-tasikmalaya-laporkan-istri-selingkuh-hingga-diduga-aborsi>

<https://radartasik.disway.id/read/653169/rsia-di-tasikmalaya-terseret-kasus-perselingkuhan-dan-perzinahan-diduga-jadi-tempat-pengguguran-janin>

<https://www.surat kabarindonesiahebat.com/news-23981-pelaporan-atas-dugaan-tindak-pidana-perselingkuhan-perzinahan-sampai-persekongkolan.html>